RENJA SEKRETARIAT DAERAH



PERUBAHAN RENCANA KERJA

RENJA 2025

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan anggaran dalam sub kegiatan Tahun 2025, sebagai upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renja Sekretariat Daerah, terutama apabila dilakukan review atas Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam Upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 5 Juni 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Drs. Hary Agung Prabowo, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680119 199311 1 001

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 5 Juni 2025

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan,	Petugas Verifikator,
Ewiek Khavida, S.STP, MM	Arthati Dwi Hutami, S.E.
NIP. 19831118 200212 2 001	NIP. 19790611 200312 2 006

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Dr. HENDRA SUMARYANA, MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

BAB I PENDAHULUAN ..... **iv**

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... **6**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 6

A. Evaluasi Kinerja IKUPD dan Program 7

B. Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan 12

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **17**

3.1. Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 17

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 21

BAB IV PENUTUP **28**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 6
Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 7
Tabel 2. 3 Capaian Kegiatan pada Triwulan I Sekretariat Daerah 12

Tabel 3. 1 Rencana Perubahan Renja tahun 2025 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah:

a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2025 dengan pagu APBD tahun 2025.
b. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;
c. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output;
d. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;
e. Adanya SE Efisiensi Anggaran.

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Perubahan Tahun 2025 melalui tahapan-tahapan :

1) Persiapan penyusunan

2) Penyusunan rancangan awal

3) Penyusunan rancangan

4) Perumusan rancangan akhir

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah yang akan dilaksanakan pada triwulan II, III dan triwulan IV tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Dalam melakukan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja unuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Sekretariat Daerah tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I sesuai dengan kriteria pencapaiannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Capaian indikator kinerja disajikan sebagai sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100,00%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90,00%	Tinggi
3	66% ≤ 75,00%	Sedang
4	51% ≤ 65,00%	Rendah
5	≤ 50,00%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berikut adalah capaian kinerja atas pelasakaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja IKUPD dan Kinerja program dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah

2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah
3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa :
   a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
   b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Sekretariat Daerah, dan
   c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan tahun kedua penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

A. Evaluasi Kinerja IKUPD dan Program

Capaian kinerja program Sekretariat Daerah disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2. 2
Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target	Realisasi s.d TW I 2025		
I	Tujuan Pemda :						
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B>60-70	*86,01	100	Sangat Tinggi
II	Sasaran Pemda :						
	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif , bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat	B>60-70	*66,36	100	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B/76,61 – 88,30	*86,91	100	Sangat Tinggi
III	Sasaran / Program :						
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	angka	3,45	3,434	99,54	Sangat Tinggi

	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kerjasama yang diimplementasikan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	%	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik	%	88	87,84	99,82	Sangat Tinggi
		Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	60	40	66,67	Sedang
3	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Persentase cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang terfasilitasi	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	86	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	61,9	61,9	Rendah
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100	0	0	Sangat Rendah
4	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	25	25	Sangat Rendah

		Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33	83,33	100	Sangat Tinggi
		Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%	100	1,6	1,6	Sangat Rendah
		Persentase laporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100	99,03	99,03	Sangat Tinggi
		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja tepat waktu	%	100	100	100	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah	%	40	40	100	Sangat Tinggi
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	%	100	2,17	2,17	Sangat Rendah
		Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	%	100	11,11	11,11	Sangat Rendah
		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	98	14,75	15,05	Sangat Rendah
6	Meningkatnya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang terfasilitasi	Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggan dan keprotokolan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	28,57	29	Sangat Rendah
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	Sangat Tinggi

		Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	Predikat	B (3,51-4,00)	*86,91	100	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berpredikat BB	%	23,9	*30,43	100	Sangat Tinggi

Sumber : IKPD Sekretariat Daerah 2025

Berdasarkan hasil evaluasi pada kinerja IKUPD dan indikator program Sekretariat Daerah, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja diantaranya adalah:

1. Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi disebabkan adanya perubahan kebijakan.
2. Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH disebabkan Lambatnya penyetoran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari sarpras yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal.
3. Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi karena Integritas yang tinggi serta terjaganya sinergitas yang baik dengan lembaga penegak hukum, optimalnya penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan/non litigasi (semakin banyak penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan, maka meminimalisasi penyelesaian permasalahan secara litigasi).
4. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi disebabkan Agen/Pangkalan BBM dan LPG tidak melaporkan stok.
5. Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi disebabkan adanya efisiensi anggaran sehingga pekerjaan yang sudah dilelang tidak dilanjutkan kontraknya dan pada Triwulan 1 sebagian besar pekerjaan belum dimulai.
6. Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender) disebabkan Persiapan Perencanaan dari Perangkat Daerah dan kebijakan dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan.
7. Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta) disebabkan Kinerja OPD belum melaksanakan pengadaan EPL diatas 100 juta secara keseluruhan.

8. Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa disebabkan Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 50 juta.
9. Presentase pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah disebabkan adanya perubahan kebijakan maupun kebijakan baru yang belum dapat diterapkan secara maksimal, aplikasi yang sering maintenance, target akan tercapai pada Triwulan IV karena bersifat rutin.

Adapun beberapa indikator masih menggunakan capaian Triwulan IV tahun 2024, dikarenakan :

1. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi masih menggunakan capaian tw IV dikarenakan Nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung merupakan hasil evaluasi sementara dari KemenPANRB Tahun 2024.
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 masih menggunakan angka/nilai Tahun 2024 karena hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 belum dilaksanakan, akan tetapi untuk bukti dukung sudah di unggah melalui aplikasi e-SAKIP Reviu Kementerian PANRB.
3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 masih menggunakan angka/nilai Tahun 2024 karena nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 masih dalam tahap pelaksanaan survey dan hasilnya akan diketahui pada bulan November tahun 2025.
4. Indikator Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 masih menggunakan nilai EPPD Tahun 2023 dikarenakan nilai EPPD Tahun 2025 sampai pada Maret 2025 belum dilakukan perhitungan penilaian oleh Kemendagri.

B. Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan

Tabel 2. 3
Capaian Kegiatan pada Triwulan I Sekretariat Daerah

No	Bidang /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp.)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw I (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
		RENJA	DPA		Target	Realisasi	Capaian (%)	
A	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**1.109.488.600**	**1.242.074.800**	**16.700.703**				
1	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**							
a	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	50.000.000	50.000.000	1.638.000	111	137	100,00	Sangat Tinggi
b	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.013.750.000	1.156.000.000	5.719.297	30	6	20,00	Sangat Rendah
c	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	45.738.600	36.074.800	9.343.406	111	21	18,92	Sangat Rendah
B	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**							
1	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**30.412.067.975**	**25.634.489.600**	**680.769.815**				
a	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	263.579.375	250.000.000	15.400.000	2	0,50	25,00	Sangat Rendah
b	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	29.048.488.600	24.484.489.600	16.780.818	1	0,10	10,00	Sangat Rendah
c	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.100.000.000	900.000.000	648.588.997	1	0,30	30,00	Sangat Rendah
C	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**374.472.750**	**313.134.750**	**7.726.000**				
1	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**338.178.750**	**297.634.750**	**7.726.000**				
a	Penataan Administrasi pemerintahan	24.864.000,00	13.000.000	-	12	2	16,67	Sangat Rendah
b	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	15.000.000,00	12.500.000	7.726.000	12	3	25,00	Sangat Rendah
c	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	298.314.750,00	272.134.750	-	6	3	50,00	Sangat Rendah
2	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**36.294.000**	**15.500.000**	**-**				
a	Fasiilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	36.294.000,00	15.500.000	-	12	3	25,00	Sangat Rendah
D	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**							

1	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**123.810.000**	**116.810.000**	**10.834.703**				
a	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	45.000.000	15.067.000	0,00	1	0,25	25,00	Sangat Rendah
b	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	78.810.000	101.743.000	10.834.703,00	4	1	25,00	Sangat Rendah
E	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**896.003.000**	**697.716.000**	**43.570.106**				
1	**Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**107.716.000**	**77.716.000**	**15.639.406**				
a	Koordinasi,Sinkronisasi Monitoring, dan Evalusai Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	107.716.000	77.716.000	15.639.406	4	1	25,00	Sangat Rendah
2	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**788.287.000**	**607.000.000**	**27.930.700**				
a	Pengendalian dan distribusi perekonomian	38.287.000	20.000.000	3.225.000	2	1	50,00	Sangat Rendah
b	Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	750.000.000	600.000.000	24.705.700	5	2	40,00	Sangat Rendah
F	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	205.522.800	135.522.800	18.664.874				
1	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**							
a	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	110.000.000	48.000.000	11.800.000	46	1	2,17	Sangat Rendah
b	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	87.522.800	87.522.800	6.864.874	4233	856	20,22	Sangat Rendah
c	Pembinaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	8.000.000	0	0	103	25	24,27	Sangat Rendah
G	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**157.500.000**	**78.250.000**	**2.822.000**				
1	**Penataan Organisasi**	**157.500.000**	**78.250.000**	**2.822.000**				
a	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	37.500.000	0					
b	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	37.500.000	22.000.000	0	4	0,00	-	
c	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	26.250.000	0					
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	56.250.000	56.250.000	2.822.000	2	1,00	50,00	Sangat Rendah

H	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**31.437.548.595**	**29.534.376.794,98**	**5.348.275.717**				
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.256.755.678**	**14.256.755.678**	**3.754.737.825**				
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.256.755.678	14.256.755.678	3.754.737.825	1554	444	28,57	Sangat Rendah
2	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**169.662.743**	**169.662.743**	**12.518.034**				
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	169.662.743	169.662.743	12.518.034	22	4	18,18	Sangat Rendah
3	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**339.966.000**	**339.966.000**	**10.940.000**				
a	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	299.966.000	299.966.000	10.940.000	50	20	40,00	Sangat Rendah
b	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000	40.000.000	-	2	2	100,00	Sangat Tinggi
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.069.999.500**	**2.069.999.500**	**89.840.469**				
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	100.000.000	-	12	3	25,00	Sangat Rendah
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000	120.000.000	-	12	3	25,00	Sangat Rendah
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	320.000.000	320.000.000	-	12	3	25,00	Sangat Rendah
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	50.000.000	6.937.000	228	19	8,33	Sangat Rendah
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000.000	1.000.000.000	47.750.000	12	3	25,00	Sangat Rendah
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	479.999.500	479.999.500	35.153.469	12	3	25,00	Sangat Rendah
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.355.939.999**	**3.452.768.198**	**51.000.000**				
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.905.939.999	3.203.439.998	-	6	0	0	Sangat Rendah
b	Pengadaan Mebel	200.000.000	44.400.000	-	4	0	0	Sangat Rendah
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000	204.928.200	51.000.000	20	0	0	Sangat Rendah

6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.547.897.000**	**5.547.897.000**	**1.120.248.204**				
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	-	12	3	25,00	Sangat Rendah
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.098.400.000	1.098.400.000	219.997.579	12	3	25,00	Sangat Rendah
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.434.497.000	4.434.497.000	900.250.625	12	3	25,00	Sangat Rendah
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.799.788.000**	**1.799.788.000**	**89.649.425**				
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	250.000.000	38.761.725	28	6	21,43	Sangat Rendah
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.000.000	750.000.000	50.887.700	20	5	25,00	Sangat Rendah
c	Pemeliharaan Mebel	79.888.000	79.888.000	-	12	3	25,00	Sangat Rendah
d	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	100.000.000	-	12	3	25,00	Sangat Rendah
e	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.900.000	19.900.000	-	1	0	-	Sangat Rendah
f	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000.000	600.000.000	-	72	6	8,33	Sangat Rendah
8	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**1.897.539.675**	**1.897.539.675**	**219.341.760**				
a	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	300.000.000	300.000.000	50.000.000	12	3	25,00	Sangat Rendah
b	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	282.000.000	282.000.000	-	12	3	25,00	Sangat Rendah
c	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.315.539.675	1.315.539.675	169.341.760	12	3	25,00	Sangat Rendah
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.796.249.400**	**2.690.265.300**	**210.375.392**				
1	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**600.000.000**	**600.000.000**	**108.000.000**				
c	Penyediaan Dana Penunjang Opersional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	108.000.000	192	48	25,00	Sangat Rendah
2	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**1.196.249.4000**	**1.730.999.706**	**102.375.392**				

a	Fasilitasi Keprotokolan	491.999.700	495.999.853	497.343.700	500	201	40,20	Sangat Rendah
b	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	454.250.000	900.000.000	1.154.250.000	2000	518	25,90	Sangat Rendah
c	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	249.999.700	334.999.853	438.671.600	800	227	28,38	Sangat Rendah

Sumber : Sekretariat Daerah, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan subkegiatan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja diantaranya adalah pada Triwulan I pelaksanaan uang persediaan bulan Februari, adanya kebijakan KKPD yang belum maksimal, adanya kebijakan efisiensi anggaran, dan kinerja yang satuannya laporan bersifat rutin sehingga akan tercapai pada Triwulan IV.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan I. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal Sekretariat Daerah tahun 2025 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Sekretariat Daerah tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1
Rencana Perubahan Renja tahun 2025

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu perubahan	(-/+)		Ket
		Renja	APBD		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
1	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**374.472.750**	**313.134.750**	**225.824.025**	**-148.648.725**	**-87.310.725**	
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	**338.178.750**	**297.634.750**	**212.521.975**	**-125.656.775**	**-85.112.775**	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	24.864.000	13.000.000	900.400	-23.963.600	-12.099.600	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	15.000.000	12.500.000	8.147.100	-6.852.900	-4.352.900	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	298.314.750	272.134.750	203.474.475	-94.840.275	-68.660.275	
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	**36.294.000**	**15.500.000**	**13.302.050**	**-22.991.950**	**-2.197.950**	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	36.294.000	15.500.000	13.302.050	-22.991.950	-2.197.950	
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**1.952.556.975**	**25.634.489.600**	**25.753.033.050**	**23.800.476.075**	**118.543.450**	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**1.952.556.975**	**25.634.489.600**	**25.753.033.050**	**23.800.476.075**	**118.543.450**	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	263.579.375	250.000.000	208.303.000	-55.276.375	-41.697.000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	588.977.600	24.484.489.600	24.357.978.100	23.769.000.500	-126.511.500	

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.100.000.000	900.000.000	1.186.751.950	86.751.950	286.751.950	
3	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**1.109.488.600**	**1.242.074.800**	**934.165.250**	**-175.323.350**	**-307.909.550**	
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**1.109.488.600**	**1.242.074.800**	**934.165.250**	**-175.323.350**	**-307.909.550**	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	50.000.000	50.000.000	26.962.350	-23.037.650	-23.037.650	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.013.750.000	1.156.000.000	874.387.500	-139.362.500	-281.612.500	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	45.738.600	36.074.800	32.815.400	-12.923.200	-3.259.400	
4	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**896.003.000**	**697.716.000**	**676.593.100**	**-219.409.900**	**-21.122.900**	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**146.003.000**	**97.716.000**	**76.593.100**	**-69.409.900**	**-21.122.900**	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	107.716.000	77.716.000	60.751.900	-46.964.100	-16.964.100	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	38.287.000	20.000.000	15.841.200	-22.445.800	-4.158.800	
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**750.000.000**	**600.000.000**	**600.000.000**	**-150.000.000**	**0**	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	750.000.000	600.000.000	600.000.000	-150.000.000	0	
5	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**123.810.000**	**116.810.000**	**87.285.720**	**-36.524.280**	**-29.524.280**	
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**123.810.000**	**116.810.000**	**87.285.720**	**-36.524.280**	**-29.524.280**	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	45.000.000	15.067.000	8.870.000	-36.130.000	-6.197.000	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	78.810.000	101.743.000	78.415.720	-394.280	-23.327.280	
6	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**135.522.800**	**135.522.800**	**116.477.400**	**-19.045.400**	**-19.045.400**	
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**135.522.800**	**135.522.800**	**116.477.400**	**-19.045.400**	**-19.045.400**	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	48.000.000	48.000.000	50.240.800	2.240.800	2.240.800	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	87.522.800	87.522.800	66.236.600	-21.286.200	-21.286.200	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	0		0	0	
7	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**31.437.548.595**	**29.534.376.794**	**28.443.274.832**	**-2.994.273.763**	**-1.091.101.962**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**14.256.755.678**	**14.256.755.678**	**15.172.147.677**	**915.391.999**	**915.391.999**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.256.755.678	14.256.755.678	15.172.147.677	915.391.999	915.391.999	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**509.628.743**	**509.628.743**	**513.870.312**	**4.241.569**	**4.241.569**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	169.662.743	169.662.743	173.904.312,00	4.241.569	4.241.569	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala	299.966.000	299.966.000	299.966.000,00	0	0	

	Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	0	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**2.069.999.500**	**2.069.999.500**	**2.934.854.550**	**864.855.050**	**864.855.050**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	100.000.000	70.120.000,00	-29.880.000	-29.880.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000	120.000.000	111.500.000,00	-8.500.000	-8.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	320.000.000	320.000.000	256.044.800	-63.955.200	-63.955.200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000.000	1.000.000.000	1.900.000.000	900.000.000	900.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	479.999.500	479.999.500	547.189.750	67.190.250	67.190.250	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**5.355.939.999**	**3.452.768.198**	**1.651.568.199**	**-3.704.371.800**	**-1.801.199.999**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.905.939.999	3.203.439.998	1.402.239.999,00	-3.503.700.000	-1.801.199.999	
	Pengadaan Mebel	200.000.000	44.400.000	44.400.000,00	-155.600.000	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000	204.928.200	204.928.200,00	-45.071.800	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**5.547.897.000**	**5.547.897.000**	**4.192.487.000**	**-1.355.410.000**	**-1.355.410.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	0	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.098.400.000	1.098.400.000	1.098.400.000,00	0	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.434.497.000	4.434.497.000	3.079.087.000,00	-1.355.410.000	-1.355.410.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.799.788.000**	**1.799.788.000**	**2.088.407.419**	**288.619.419**	**288.619.419**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	250.000.000	454.334.639	204.334.639	204.334.639	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.000.000	750.000.000	734.678.000,00	-15.322.000	-15.322.000	
	Pemeliharaan Mebel	79.888.000	79.888.000	79.888.000,00	0	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	100.000.000	99.606.780,00	-393.220	-393.220	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.900.000	19.900.000	19.900.000,00	0	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000.000	600.000.000	700.000.000,00	100.000.000	100.000.000	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**1.897.539.675**	**1.897.539.675**	**1.889.939.675**	**-7.600.000**	**-7.600.000**	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	300.000.000	300.000.000	300.000.000,00	0	0	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	282.000.000	282.000.000	282.000.000,00	0	0	

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.315.539.675	1.315.539.675	1.307.939.675,00	-7.600.000	-7.600.000	
8	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	**78.250.000**	**78.250.000**	**51.346.600**	**-26.903.400**	**-26.903.400**	
	Kegiatan Penataan Organisasi	**78.250.000**	**78.250.000**	**51.346.600**	**-26.903.400**	**-26.903.400**	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	22.000.000	22.000.000	14.587.800	-7.412.200	-7.412.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	56.250.000	56.250.000	36.758.800	-19.491.200	-19.491.200	
9	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	**2.500.265.300**	**2.690.265.300**	**3.488.406.430**	**988.141.130**	**798.141.130**	
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**600.000.000**	**600.000.000**	**600.000.000**	**0**	**0**	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0	0	
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**1.900.265.300**	**2.090.265.300**	**2.888.406.430**	**988.141.130**	**798.141.130**	
	Fasilitasi Keprotokolan	497.343.700	497.343.700	436.864.200	-60.479.500	-60.479.500	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.154.250.000	1.154.250.000	1.775.361.000	621.111.000	621.111.000	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	248.671.600	438.671.600	676.181.230	427.509.630	237.509.630	

Dari tabel di atas Berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2025, maka total anggaran Rp 60.442.640.044,- Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pagu awal Renja : Rp 38.607.918.020,-
2. Pagu Awal APBD : Rp 60.442.640.044,-
3. Pagu Perubahan : Rp 59.776.406.407,-
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja: Rp 21.168.488.387,-
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu awal APBD: Rp -666.233.637,-

Selisih antara pagu awal renja dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Penyesuaian pagu sub kegiatan renja terhadap pagu Sub Kegiatan APBD;
2. Adanya kebutuhan kedinasan yang harus dipenuhi;
3. Adanya SE efisiensi anggaran;
4. Pemanfaatan sisa tender

Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Penggeseran pagu antar sub kegiatan;
2. Penambahan anggaran untuk kegiatan Kepala Daerah yang harus dipenuhi;
3. Adanya SE efisiensi anggaran;
4. Pemanfaatan sisa tender

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025

Rincian rencana Perubahan Renja Sekretariat Daerah tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BAGIAN PEMERINTAHAN							**374.472.750,00**	**313.134.750,00**	**225.824.025,00**	**-148.648.725,00**							**492.978.693,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**374.472.750,00**	**313.134.750,00**	**225.824.025,00**	**-148.648.725,00**							**492.978.693,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**374.472.750,00**	**313.134.750,00**	**225.824.025,00**	**-148.648.725,00**							**492.978.693,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	-				**100 %**	-	**374.472.750,00**	**313.134.750,00**	**225.824.025,00**	**118.505.943,00**							**492.978.693,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				12 dokumen 6 dokumen	-	338.178.750,00	297.634.750,00	212.521.975,00	-125.656.775,00			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Kepala OPD dan Lurah		467.978.693,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				12 Dokumen	12 Dokumen	24.884.000,00	13.000.000,00	900.400,00	-23.983.600,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	12.500.000,00	8.147.100,00	-6.852.900,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	298.314.750,00	272.134.750,00	203.474.475,00	-94.840.275,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			444.978.693,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*				12 Dokumen	12 Dokumen	36.294.000,00	15.500.000,00	13.302.050,00	-22.991.950,00			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Kabupaten Temanggung		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	36.294.000,00	15.500.000,00	13.302.050,00	-22.991.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							**1.109.488.600,00**	**1.242.074.800,00**	**934.165.250,00**	**-175.323.350,00**							**1.437.746.886,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.109.488.600,00**	**1.242.074.800,00**	**934.165.250,00**	**-175.323.350,00**							**1.437.746.886,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.109.488.600,00**	**1.242.074.800,00**	**934.165.250,00**	**-175.323.350,00**							**1.437.746.886,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	-				**100 85 persen persen**	-	**1.109.488.600,00**	**1.242.074.800,00**	**934.165.250,00**	**328.258.286,00**							**1.437.746.886,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				111 Produk 30 Kasus	-	1.109.488.600,00	1.242.074.800,00	934.165.250,00	-175.323.350,00			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.437.746.886,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				111 Dokumen	111 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	26.962.350,00	-23.037.650,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				30 Kasus	30 Kasus	1.013.750.000,00	1.156.000.000,00	874.387.500,00	-139.362.500,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			1.337.746.886,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				111 Dokumen	111 Dokumen	45.738.600,00	36.074.800,00	32.815.400,00	-12.923.200,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN BINA MENTAL							**30.412.067.975,00**	**25.634.489.600,00**	**25.753.033.050,00**	**-4.659.034.925,00**							**2.900.970.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**30.412.067.975,00**	**25.634.489.600,00**	**25.753.033.050,00**	**-4.659.034.925,00**							**2.900.970.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**30.412.067.975,00**	**25.634.489.600,00**	**25.753.033.050,00**	**-4.659.034.925,00**							**2.900.970.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi**				**90 60 % %**	**90 60 % %**	**30.412.067.975,00**	**25.634.489.600,00**	**25.753.033.050,00**	**-27.511.097.975,00**							**2.900.970.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat*				4 Dokumen	4 Dokumen	30.412.067.975,00	25.634.489.600,00	25.753.033.050,00	-4.659.034.925,00			-	1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan	Masyarakat di Kabupaten Temanggung		2.900.970.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	2 Dokumen	263.579.375,00	290.000.000,00	208.303.000,00	-55.276.375,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan			1.252.670.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			1 Dokumen	1 Dokumen	29.048.488.600,00	24.484.489.600,00	24.357.978.100,00	-4.690.510.500,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan			388.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000.000,00	900.000.000,00	1.186.751.950,00	86.751.950,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan			1.260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN							**896.003.000,00**	**697.716.000,00**	**676.593.100,00**	**-219.409.900,00**							**157.716.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**896.003.000,00**	**697.716.000,00**	**676.593.100,00**	**-219.409.900,00**							**157.716.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**896.003.000,00**	**697.716.000,00**	**676.593.100,00**	**-219.409.900,00**							**157.716.000,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP persentase ketersediaan produk barang bersubsidi**				**83,33 100 % %**	**83,33 100 % %**	**896.003.000,00**	**697.716.000,00**	**676.593.100,00**	**-738.287.000,00**							**157.716.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*				2 Laporan 4 Dokumen	2 Laporan 4 Dokumen	146.003.000,00	97.716.000,00	76.593.100,00	-69.409.900,00			-	2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Tertaksananya Kebijakan Perekonomian		157.716.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	107.716.000,00	77.716.000,00	60.751.900,00	-46.964.100,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan			107.716.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	38.287.000,00	20.000.000,00	15.841.200,00	-22.445.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja*				5 Dokumen	5 Dokumen	750.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-150.000.000,00			-	2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				5 Dokumen	5 Dokumen	750.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEMBANGUNAN							**123.810.000,00**	**116.810.000,00**	**87.285.720,00**	**-36.524.280,00**							**158.365.794,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**123.810.000,00**	**116.810.000,00**	**87.285.720,00**	**-36.524.280,00**							**158.365.794,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**123.810.000,00**	**116.810.000,00**	**87.285.720,00**	**-36.524.280,00**							**158.365.794,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu**				**100 95 % %**	**95 100 % %**	**123.810.000,00**	**116.810.000,00**	**87.285.720,00**	**34.555.794,00**							**158.365.794,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*				1 Dokumen 4 Laporan	1 Dokumen 4 Laporan	123.810.000,00	116.810.000,00	87.285.720,00	-36.524.280,00			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Perangkat Daerah		158.365.794,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	15.067.000,00	8.870.000,00	-36.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			68.629.494,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	78.810.000,00	101.743.000,00	78.415.720,00	-394.280,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			89.736.300,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							**205.522.800,00**	**135.522.800,00**	**116.477.400,00**	**-89.045.400,00**							**240.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**205.522.800,00**	**135.522.800,00**	**116.477.400,00**	**-89.045.400,00**							**240.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**205.522.800,00**	**135.522.800,00**	**116.477.400,00**	**-89.045.400,00**							**240.000.000,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan**				**100 98 persen persen**	**98 100 persen persen**	**205.522.800,00**	**135.522.800,00**	**116.477.400,00**	**34.477.200,00**							**240.000.000,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Berhasil Dilaksanakan Sesuai Dengan Prinsip Pengadaan*				100 Persen	100 Persen	205.522.800,00	135.522.800,00	116.477.400,00	-89.045.400,00			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Perangkat daerah atau yang lainnya		240.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				120 Dokumen	120 Dokumen	110.000.000,00	48.000.000,00	60.240.800,00	-59.759.200,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				170 Dokumen	170 Dokumen	87.522.800,00	87.522.800,00	66.236.600,00	-21.286.200,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				103 Orang	103 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM							**31.437.548.595,00**	**29.534.376.794,98**	**28.443.274.832,00**	**-2.994.273.763,00**							**26.538.407.187,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.437.548.595,00**	**29.534.376.794,98**	**28.443.274.832,00**	**-2.994.273.763,00**							**26.538.407.187,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**31.437.548.595,00**	**29.534.376.794,98**	**28.443.274.832,00**	**-2.994.273.763,00**							**26.538.407.187,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Adminstrasi Keuangan Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**31.437.548.595,00**	**29.534.376.794,98**	**28.443.274.832,00**	**-4.899.141.408,00**							**26.538.407.187,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase capaian indikator Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				125 Orang/ Bulan	125 Orang/ Bulan	14.256.755.678,00	14.256.755.678,00	15.172.147.677,00	915.391.999,00			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Seluruh ASN Sekretariat Daerah		14.328.710.810,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/ bulan	125 Orang/ bulan	14.256.755.678,00	14.256.755.678,00	15.172.147.677,00	915.391.999,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			14.328.710.810,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase capaian Indikator Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 bulan	12 bulan	2.069.999.500,00	2.069.999.500,00	2.934.854.350,00	864.855.050,00			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Unsur OPD		2.330.460.214,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	70.120.000,00	-29.880.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	120.000.000,00	120.000.000,00	111.500.000,00	-8.500.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	320.000.000,00	320.000.000,00	256.044.800,00	-63.955.200,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				120 Unit	120 Unit	79.888.000,00	79.888.000,00	79.888.000,00	0,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	99.606.780,00	-393.220,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	19.900.000,00	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	700.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase capaian indikator Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				2 Orang	2 Orang	509.628.743,00	509.628.743,00	513.870.312,00	4.241.569,00			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Pimpinan Daerah		509.749.163,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	169.662.743,00	169.662.743,00	173.904.312,00	4.241.569,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			169.749.163,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	299.966.000,00	299.966.000,00	299.966.000,00	0,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase capaian indikator Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah pada Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*				12 bulan	12 bulan	1.897.539.675,00	1.897.539.675,00	1.889.939.675,00	-7.600.000,00			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Pimpinan Daerah, Unsur OPD		3.082.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	282.000.000,00	282.000.000,00	282.000.000,00	0,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			282.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.315.539.675,00	1.315.539.675,00	1.307.939.675,00	-7.600.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							**157.500.000,00**	**78.250.000,00**	**51.346.600,00**	**-106.153.400,00**							**262.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**157.500.000,00**	**78.250.000,00**	**51.346.600,00**	**-106.153.400,00**							**262.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**157.500.000,00**	**78.250.000,00**	**51.346.600,00**	**-106.153.400,00**							**262.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berpredikat BB**				**23,9 %**	**23,9 %**	**157.500.000,00**	**78.250.000,00**	**51.346.600,00**	**104.500.000,00**							**262.000.000,00**	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase capaian indikator Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah pada Kegiatan Penataan Organisasi*				90 %	90 %	157.500.000,00	78.250.000,00	51.346.600,00	-106.153.400,00			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Perangkat Daerah		262.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	37.500.000,00	0,00	0,00	-37.500.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			97.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	37.500.000,00	22.000.000,00	14.587.800,00	-22.912.200,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	26.250.000,00	0,00	0,00	-26.250.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	56.250.000,00	56.250.000,00	36.758.800,00	-19.491.200,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			63.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							**1.796.249.400,00**	**2.690.265.300,00**	**3.488.406.430,64**	**1.692.157.030,64**							**2.925.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.796.249.400,00**	**2.690.265.300,00**	**3.488.406.430,64**	**1.692.157.030,64**							**2.925.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.796.249.400,00**	**2.690.265.300,00**	**3.488.406.430,64**	**1.692.157.030,64**							**2.925.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah**				**100 % persen**	**100 % persen**	**1.796.249.400,00**	**2.690.265.300,00**	**3.488.406.430,64**	**1.128.750.600,00**							**2.925.000.000,00**	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				100 %	100 %	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Perangkat Daerah atau yang lainnya		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase Fasilitasi Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Pendokumentasian tugas pimpinan*				12 Laporan	12 Laporan	1.196.249.400,00	2.090.265.300,00	2.888.406.430,64	1.692.157.030,64			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Perangkat daerah atau yang lainnya		2.325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	491.999.700,00	497.343.700,00	436.864.200,00	-55.135.500,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			525.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	454.250.000,00	1.154.250.000,00	1.775.361.000,00	1.321.111.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	249.999.700,00	438.671.600,00	676.181.230,64	426.181.530,64	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 yang telah disusun sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan I ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2025, Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Program 18 Kegiatan dan 48 sub kegiatan yang terdiri dengan total pagu indikatif Rp 59.776.406.407,-

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah pada perubahan Renja Tahun 2025 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2025 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan

daerah yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 5 Juni 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung

Drs. Hary Agung Prabowo, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680119 199311 1 001